

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PACIFIC RESET* DALAM
MENGHADAPI KRISIS PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH :

AULIYA RIZQI ANANDA

E061191008

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PACIFIC RESET* TERHADAP KRISIS
PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

AULIYA RIZQI ANANDA

E061191008

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PACIFIC RESET* DALAM MENGHADAPI KRISIS PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN

N A M A : AULIYA RIZQI ANANDA

N I M : E061191008

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 November 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.
NIP. 196307041988031001

Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PACIFIC RESET* DALAM MENGHADAPI KRISIS PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN

N A M A : AULIYA RIZQI ANANDA

N I M : E061191008

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 31 Oktober 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AULIYA RIZQI ANANDA

NIM : E061191008

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PACIFIC RESET* TERHADAP KRISIS PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Oktober 2023

Yang menyatakan



(AULIYA RIZQI ANANDA)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya serta sholawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan *Pacific Reset* dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim di Pasifik Selatan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, berbagai hambatan maupun keterbatasan berhasil dilewati penulis. Selama proses penyusunan, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam terhadap berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan kasihi ibu **Ros Eny Darmin** dan ayah **Drs. Sudirman M,pd.** Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan didikan yang telah diberikan kepada penulis sejak lahir hingga dapat tumbuh menjadi dewasa seperti saat ini. Semua langkah yang penulis ambil selalu disertai oleh doa, dukungan dan pengorbanan dari orang tua penulis. Semoga

penulis dapat membalas segala kasih sayang dan pengorbanan serta kebaikan mereka hingga akhir hayat.

2. Adik penulis, **Rizqi Ramadhan, Dava Rayhan Alyansyah** dan **Aura Binar Syafitri** yang menjadi salah satu penyemangat penulis, semoga penulis bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga selalu diberi kesehatan.
3. Keluarga penulis, **Tante Wanti, Tante Diana, Tante Ramla** dan **Om Rusli** terima kasih senantiasa penulis jadikan untuk persinggahan dikala lagi nomaden atau bahkan dipanggil kerumah untuk jalan-jalan atau bikin acara kecil-kecilan.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta jajarannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Bapak **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.**, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis **Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.**
5. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si**, beserta jajarannya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu **Dr.**

Hasniati, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan Bidang Perencanaan , Sumber Daya dan Alumni Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.** dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Bapak **Prof. Dr. Suparman, M.Si.**

6. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof Darwis, MA, Ph.D** yang telah membantu dalam memberikan solusi dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak **M.Imran Hanafi MA., M.Ec** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.SI., MIR** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas arahan, motivasi, bimbingan dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Patrice Lumumba, MA., Bapak (Alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Muh. Nasir Badu, S. Sos, M.Hum, Ph. D., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Bama Andika Putra, S.IP, MIR, Bapak Muh Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., dan Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA.** Terima

kasih atas ilmunya selama masa studi di program studi Hubungan Internasional.

9. Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B., MA** selaku Dosen Penasehat Akademik penulis. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya kepada penulis selama masa studi penulis.
10. Staf Departemen Hubungan Internasional, **Kak Rahma, Pak Ridho** dan **Kak Salmi** yang sudah membantu proses administrasi selama masa studi penulis.
11. Kepada **Hartina Ridwan**, teman dari kecil penulis yang sudah memberikan tempat untuk bernaung selama beberapa bulan dan ikut andil selama perjuangan untuk dan semasa perkuliahan, terima kasih atas segala kebaikan, tawa, harunya. Semoga kita bisa sukses bersama.
12. Kepada **Ba'ba, Tante Diya, Tante Ida, A. Alifia Wulandari Abidin, Tenri Aulia** pokoknya warga Andi Tonro yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, terima kasih sudah terima penulis untuk tinggal beberapa waktu selama perkuliahan.
13. Kawan seperjuangan selama huru-hara skripsi/WISUDA SALDI ada **Uga, Uci, Mufly, Riswan, Alif, Saldi dan Uta**. Terima kasih atas bantuannya selama pengerjaan skripsi dan suasana yang dibangun walaupun terkadang kebanyakan cerita, *somehow we need that*. Semoga kebaikan kalian bisa penulis balas, kalau bukan penulis mungkin melalui yang diatas. Aamiin.

14. L2NP (**Icha, Nisa, Tenri, Titin, Fasya, Ajeng dan Pira**) kawan-kawan SMA penulis yang cukup random, kocak dan frontal. Walaupun sekarang sudah memiliki kesibukan masing-masing, penulis harap kita bisa bertemu lengkap lagi, sehat-sehat ya kalian.
15. Idiot Gurls (**Wulan, Tenri, Icha, Nisa, Kina dan Frisca**) walaupun kadang menghilang ditelan bumi karena kesibukan masing-masing tapi sekali muncul langsung heboh, terima kasih atas segala momen dan pelajaran hidup yang diberikan.
16. Swaggiez (**Uci Lestari, Niksinur Sambikal dan Nur Azizah Nasrun**) kawan sejak maba, terima kasih atas kebaikan serta momen canda, tawa, sedih, haru semasa kuliah, semoga pertemanan kita langgeng sampai kapan pun.
17. Tamu Kos (**Indra, Mita, Rini, Muti, Alif, Amam, Canas, Dylan, Fiqri, Icha, Ici, Putra, Rio, Riswan, Saka, Uci, Uga, Wira, Abdi dan Dimas**) terima kasih untuk momen-momennya dan dukungan moral yang diberikan sepanjang perkuliahan.
18. Terima kasih kepada **HIMAHI FISIP UNHAS** beserta orang-orang didalamnya yang menjadi tempat penulis untuk tumbuh dan berkembang. Kepada **Kak Gun, Kak Ryan, Kak Fadhil, Kak Ikrana, Kak Novi, Kak Tyas, Kak Ayi, Kak Iyun, Kak Rizky, Kak Ainil, Kak Dian, Kak Tatu, Kak Ucil, Kak Rifqi, Kak Ucup, Kak Novi, Kak Dito, Kak Sule, Kak Defki, Kak Wais, Kak Cici, Kak Era, Kak Eca, Kak Agal, Kak Asrul, Kak Ilmi, Kak Faiza dan**

Kak Aweks. Terima kasih atas diskusi-diskusi selama berhimpun dan bantuan yang diberikan.

19. **Mace Khalifah** dan **Kak Muli** sudah menjadi tempat untuk asupan makan, minum dan cemilan selama dikampus. Semoga selalu diberikan kesehatan.

20. HISTORIA, ada **Nadya, Akbar, Hadi, Mega, Wiwit, Maya, Odip, Nadin, Nada, Amri, Nisya, Olaf, Ucing, Fitri, Adetry, Manda, Nia, Cawang, Farel, Ferhard, Lala, Sain, Dimas** dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya, terima kasih sudah menemani selama perkuliahan. Tidak lupa juga kepada **Iqbal** yang menjadi *plot twist of the year* yang ternyata sepupu penulis.

21. Terima Kasih kepada **Muhamad Muflih Kabiir Munawar**, seseorang yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, selalu menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi kepada saya dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah, terima kasih atas segalanya.

22. Untuk **Ratu**, *roommate* sejak beberapa tahun belakangan, terima kasih atas dukungan moralnya serta bantuan yang telah diberikan. Semoga bisa bertemu kembali dilain waktu.

23. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, **Auliya Rizqi Ananda**. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati proses yang bisa dibilang tidak mudah. Berbahagialah selalu dimanapun berada, rayakan selalu kehadiranmu di dunia yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dan dampaknya terhadap krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan. Melalui konsep analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap penanganan krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan khususnya negara Fiji, Samoa dan Niue. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan *Pacific Reset* dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal yaitu Pemerintahan Jacinda Ardern yang didominasi oleh Partai Buruh yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim serta identitas New Zealand dan kedekatannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang menjadi dorongan dalam pembuatan kebijakan. Kedua, faktor eksternal yaitu komitmen New Zealand dengan terlibat didalam perjanjian internasional seperti UNFCCC, Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Implementasi kebijakan ini di ketiga negara dilaksanakan melalui berbagai program secara berkelanjutan.

Kata kunci : New Zealand, *Pacific Reset*, Pasifik Selatan, Perubahan iklim

ABSTRACT

This research focuses on New Zealand's Pacific Reset policy and its impact on the climate change crisis in the South Pacific. Through the concept of foreign policy analysis, this research will describe the factors that influence the Pacific Reset policy and how the policy impacts the handling of the climate change crisis in the South Pacific, especially the countries of Fiji, Samoa and Niue. The results found that the Pacific Reset policy was influenced by two main factors. First, internal factors, namely the Jacinda Ardern Government dominated by the Labor Party which is committed to addressing climate change as well as the identity of New Zealand and its relationship with countries in the South Pacific which is the main driver in policy making. Second, the external factor is New Zealand's commitment by engaging in international agreements such as the UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement. Implementation of this policy in the three countries is carried out through various programs on an ongoing basis.

Keywords: *New Zealand, Pacific Reset, South Pacific, Climate Change*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMANAAN TIM EVALUASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
1. Analisis Kebijakan Luar Negeri (<i>Foreign Policy Analysis</i>).....	9
2. Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>).....	14
E. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Jenis Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Analisis Kebijakan Luar Negeri (<i>Foreign Policy Analysis</i>)	23
B. Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	44
C. Penelitian Terdahulu.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM.....	56
A. Kebijakan <i>Pacific Reset</i>.....	56

B.	Perubahan Iklim di New Zealand	63
C.	Krisis Perubahan Iklim di Pasifik Selatan	72
1.	Krisis Perubahan Iklim di Fiji	78
2.	Krisis Perubahan Iklim di Samoa	83
3.	Krisis Perubahan Iklim di Niue	87
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		93
A.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan <i>Pacific Reset</i> New Zealand dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim	93
B.	Implementasi Kebijakan <i>Pacific Reset</i>	107
1.	Implementasi Kebijakan <i>Pacific Reset</i> di Negara Fiji.....	116
2.	Implementasi Kebijakan <i>Pacific Reset</i> di Negara Samoa	122
3.	Implementasi Kebijakan <i>Pacific Reset</i> di Negara Niue	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA		137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual	8
Gambar 2 Alasan migrasi karena perubahan iklim di Fiji	80
Gambar 3 Diagram dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan Fiji	82
Gambar 4 Diagram dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan Samoa	86
Gambar 5 Jumlah penurunan populasi penduduk di Niue sejak tahun 1966 – 2017	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak abad ke-21 isu lingkungan semakin mendapat perhatian internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan sering muncul dalam agenda politik internasional. Hal ini karena kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan terjadi tanpa mengenal batas negara, oleh karena itu masalah yang terjadi di suatu negara akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap negara lain. Maka dari itu, isu lingkungan merupakan isu global dan semua negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menjamin keamanan lingkungan (Bakrie, 2017).

Perubahan iklim atau *climate change* menjadi isu hangat dalam dua dekade terakhir, saat ini perubahan iklim telah mencapai keadaan yang cukup memprihatinkan dan berpengaruh terhadap aspek lingkungan, fisik, sosial ekonomi serta menimbulkan ancaman kritis dalam skala global. Adapun definisi *climate change* menurut UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) adalah perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan perubahan variabilitas iklim alami yang terjadi selama jangka waktu yang dapat dibandingkan. Sebagian besar komunitas ilmiah menyimpulkan bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia di masa depan tidak dapat dihindari

dan akan memiliki dampak lingkungan yang luas yang akan mempengaruhi cara hidup orang di banyak bagian dunia.

Suhu rata-rata bumi meningkat sejak terjadinya revolusi industri, suhu permukaan global rata-rata naik sebesar 0,9 derajat celcius antara tahun 1880 dan 2015. Adapun penyebab utama perubahan iklim adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas manusia yang meningkatkan efek rumah kaca yang berasal dari meningkatnya konsentrasi gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂HAI). Sedangkan penyumbang terbesar dalam komposisi gas rumah kaca di atmosfer global ialah CO₂ dengan persentase mencapai 80%. Berdasarkan laporan IPCC (*the Intergovernmental Panel on Climate Change*) pada tahun 2014 bahwa CO₂ memiliki konsentrasi yang terus meningkat dan mencapai sekitar 750 ppm hingga 1300 ppm, apabila peningkatan efek rumah kaca terjadi secara terus-menerus akan menghasilkan pemanasan yang lebih besar dari rata-rata yang telah dialami pada abad ke-20 (S. S. Chand et al., 2020).

Pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1990 menunjukkan bahwa kenaikan CO₂ sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan lainnya juga telah melepaskan karbon dari biosfer dimana karbon ini tinggal selama beberapa dekade hingga berabad-abad. CO₂ dari bahan bakar fosil dan penggundulan hutan telah mengganggu keseimbangan siklus karbon, karena proses alam untuk mengembalikan keseimbangan alam terlalu lambat dibandingkan dengan aktivitas manusia yang menambah CO₂ ke atmosfer (Society, 2021). Emisi GRK

tersebar sangat tidak merata di seluruh dunia, dengan delapan negara teratas menghasilkan lebih dari 55% dari total emisi GRK pada tahun 2020 dan tiga negara penghasil tertinggi yaitu Cina, Amerika Serikat dan India (UNEP, 2022).

Dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini sudah dirasakan di negara-negara kawasan Pasifik Selatan khususnya negara Fiji, Niue dan Samoa. Terdapat beberapa ancaman perubahan iklim contohnya negara Fiji semakin rentan terhadap siklon tropis, banjir, badai dan gelombang tinggi karena cuaca ekstrem. Pasokan air Niue yang terancam akibat kenaikan permukaan air laut dan rentan terhadap risiko iklim seperti siklon tropis, kekeringan, gempa bumi dan tsunami. Sama halnya seperti negara Samoa yang cukup rentan dengan risiko iklim, jika terjadi tanpa adanya mitigasi dan adaptasi, hal itu akan berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi utama seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Berdasarkan laporan IPCC tentang dampak pemanasan global menyatakan bahwa, jika pemanasan terus meningkat antara tahun 2021-2040 mencapai 1,5 derajat celcius, akan menyebabkan peningkatan berbagai bahaya iklim yang tidak dapat dihindari dan menimbulkan berbagai risiko bagi ekosistem dan manusia, disini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti ancaman atau risiko yang terjadi.

New Zealand sebagai negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan berkomitmen untuk mendukung negara-negara di kawasan tersebut dalam membangun ketahanan dan menangani *climate change*. Hal ini disampaikan oleh James Shaw sebagai Menteri Perubahan Iklim dalam Konferensi Iklim Pasifik bahwa “*New Zealand’s climate change stance is the most significant thing we*

can do for our Pacific Whanau” (Beehive.govt.nz, 2018a). Maka dari itu, di tahun 2018 pemerintah New Zealand melakukan perubahan kebijakan politik luar negeri yang paling menonjol terhadap kawasan kepulauan Pasifik dalam beberapa dekade terakhir yaitu *Pacific Reset*.

Musyawarah Kabinet pada awal tahun 2018 menegaskan bahwa perlunya ‘*refreshed approach*’ untuk hubungan New Zealand dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dan menetapkan bahwa strategi tersebut mencakup lima elemen yaitu membangun kemitraan politik yang lebih intens dan matang dengan negara-negara kepulauan Pasifik termasuk dengan menginvestasikan kembali kepemimpinan diplomasi di Pasifik, memastikan pengambilan keputusan New Zealand atas kebijakan dalam negeri yang mempertimbangkan implikasi untuk kawasan kepulauan Pasifik dan meningkatkan efektivitas organisasi regional Pasifik untuk merespon tantangan bersama dengan lebih baik. Strategi tersebut juga menyatakan bahwa aktivitas New Zealand di Pasifik harus dipandu dengan lima prinsip keterlibatan yaitu pemahaman, persahabatan, saling

Terdapat tiga hal mengapa New Zealand menganggap kawasan Pasifik begitu penting yang pertama, identitas Pasifik khususnya karakter Polinesia, terdapat keterkaitan yang lebih besar antara New Zealand dan negara-negara Cook Islands, Niue, Samoa, Tokelau dan Tonga dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kecuali Australia. Meskipun negara-negara ini kecil, terpisah-pisah dan terisolasi, pada kenyataannya negara-negara tersebut

menempati bagian wilayah Pasifik yang cukup penting dan menjadi serius saat ini.

Yang kedua ialah keamanan nasional, maksudnya Pasifik adalah lingkungan terdekat New Zealand, negara-negara Pasifik bertindak sebagai perisai bagi New Zealand. Hubungan erat yang antara New Zealand dengan negara-negara Pasifik berarti bahwa ketidakstabilan di kawasan tersebut berdampak langsung pada New Zealand. Yang ketiga, kemakmuran bersama, negara-negara kepulauan Pasifik dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik menciptakan peluang bagi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian mereka, New Zealand berupaya membantu negara-negara tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan manajemen keuangan publik yang lebih baik, sebagai pendorong utama untuk meningkatkan standar hidup dan mendanai layanan-layanan pemerintah yang vital (Beehive.govt.nz, 2018b).

Pembahasan terkait kebijakan *Pacific Reset* telah dibahas oleh beberapa orang sebelumnya seperti tulisan Anna Powles yang diterbitkan oleh *The Development Studies Network*. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana identitas, keamanan nasional dan pengaruh dalam membentuk hubungan New Zealand dengan negara-negara di Pasifik Selatan serta terbentuknya persaingan geopolitik karena meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik.

Selanjutnya tulisan oleh Mark Simon yang diterbitkan oleh *Place Branding and Public Diplomacy*. Tulisan ini membahas sejauh mana *public*

diplomacy kebijakan luar negeri New Zealand *Pacific Reset* yang menekankan keterlibatan, kemitraan dan kolaborasi. Serta tulisan oleh Lyra Asaria Uthan, Mohamad Rosyidin dan Muhammad Faizal Alfian yang diterbitkan oleh *Journal of International Relations* yang membahas kenapa New Zealand berpartisipasi cukup aktif pada krisis iklim yang terjadi di Pasifik Selatan dibawah pemerintahan Jacinda Ardern.

New Zealand semakin giat melakukan diplomasi publik terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk melakukan kerjasama ataupun memberikan bantuan dana untuk menangani isu perubahan iklim yang semakin terasa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* dan implementasi kebijakan tersebut di negara Fiji, Samoa dan Niue sejak diluncurkan tahun 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat judul penelitian “**Implementasi Kebijakan *Pacific Reset* New Zealand terhadap Krisis Perubahan Iklim di Pasifik Selatan**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi penelitian pada bidang lingkungan karena perubahan iklim berakibat secara langsung atau tidak langsung pada lingkungan di negara-negara Pasifik Selatan yang berdampak pada aktivitas dan kelangsungan hidup manusia. Penulis mengerucutkan pembahasan kepada ketiga negara karena berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi pemerintah New Zealand ketiga negara berikut di prioritaskan untuk mendapat dana bantuan dari New Zealand yakni Fiji (\$10 juta), Samoa

(\$15 juta) dan Niue (\$500.000), berikut rumusan masalah yang diangkat oleh penulis :

1. Apa faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menangani krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan *Pacific Reset* dalam menangani krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menangani krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan.
- b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menangani krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan.

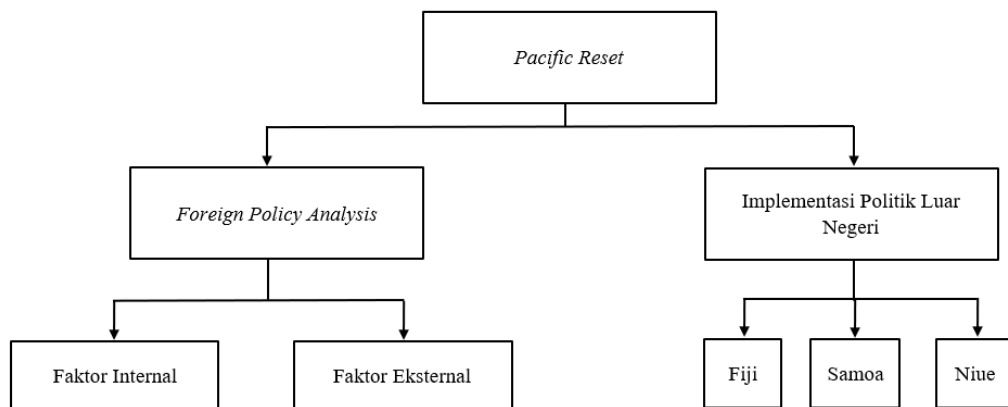
Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* yang dibuat oleh pemerintah New Zealand dijalankan dan bagaimana implementasi kebijakan

Pacific Reset dalam menangani krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan.

- b. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan implementasi kebijakan luar negeri New Zealand yaitu *Pacific Reset*.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka konseptual

Sumber : Penulis

Penelitian ini menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri dan konsep perubahan iklim (*climate change*) untuk menjelaskan variabel topik yang akan diteliti. Konsep analisis kebijakan luar negeri menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah New Zealand. Sedangkan konsep perubahan iklim akan menjelaskan

terkait perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan. Berikut adalah uraian mengenai konsep dan teori tersebut:

1. Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*)

Penelitian yang diteliti oleh penulis berawal dari sebuah permasalahan krisis perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan, New Zealand sebagai negara maju di kawasan tersebut mengambil peran dalam menangani isu perubahan iklim. Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan analisis kebijakan luar negeri, melalui konsep ini dapat dilihat bagaimana tindakan New Zealand terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ini.

Kebijakan luar negeri secara umum ialah sebuah strategi maupun tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya (Adanka, 2016). Terdapat beberapa definisi kebijakan luar negeri yaitu kebijakan luar negeri yang didefinisikan dalam buku *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* karya Marike Breunning bahwa kebijakan luar negeri ialah keseluruhan kebijakan suatu negara terhadap interaksi dengan lingkungan di luar perbatasannya.

Menurut Tayfur kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk kegiatan resmi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh agen-agen resmi dari negara berdaulat sebagai sebuah orientasi, rencana,

komitmen dan tindakan yang ditujukan kepada lingkungan eksternal negara. Sedangkan menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari oleh kepentingan dan tujuan nasional serta terdapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut (Adanka, 2016).

Analisis kebijakan luar negeri adalah studi tentang perilaku dan praktik hubungan antara berbagai aktor terutama negara dalam sistem internasional (Alden & Amnon, 2017). Analisis kebijakan luar negeri dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pemikiran yang dipakai. Pemikiran realisme menganggap bahwa nilai-nilai keamanan nasional seperti meningkatkan kekuatan militer nasional dan menyeimbangkan kekuatan militer negara lain sangat penting bagi kebijakan luar negeri sebuah negara karena pemikiran ini menganggap sistem dunia internasional bersifat anarki. Sedangkan pemikiran liberalisme menganggap demokrasi dan kebebasan merupakan nilai yang paling penting, mereka lebih mengutamakan hubungan multilateral seperti adanya organisasi internasional yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kerjasama dan meredakan konflik. Selain teori-teori hubungan internasional, teori dari bidang-bidang lain juga dapat dipakai karena analisis kebijakan luar negeri dapat bersifat multidisiplin (Sorensen et al., 2022).

Setelah penjabaran definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap negara lain. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand terhadap perubahan iklim di negara-negara kawasan Pasifik, penulis menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri oleh Kalevi J. Holsti.

Kalevi J. Holsti berpendapat bahwa dalam menganalisis kebijakan luar negeri, kita harus memiliki pengetahuan mengenai pertimbangan ideologis, serta konfigurasi umum mengenai pengaruh, kekuatan, dominasi dan subordinasi dari negara yang di analisis. Masing-masing tingkat dalam sebuah teori tingkat analisis dapat digunakan tergantung konteks permasalahan yang dianalisis. Disamping itu, Holsti menyatakan bahwa lingkungan luar negara juga tidak kalah pentingnya dengan lingkungan dalam negara. Sehingga pernyataan ini melahirkan analisis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dari suatu negara (Akbar & Nuraeni, 2023).

Holsti menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya seperti nilai, kebutuhan dan tradisi birokratis yang melandasi suatu negara untuk meluncurkan kebijakan luar negerinya berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara tersebut. Selain itu, faktor berbagai

kebutuhan sosial dan atribut-atribut nasional juga turut mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri di suatu negara, dimana tujuan, keputusan maupun tindakan dari beberapa kebijakan diluar negeri disusun untuk memenuhi kebutuhan sosial secara umum serta bertujuan untuk memajukan kepentingan tertentu dari beberapa pihak lainnya seperti kelompok domestik, partai politik dan perusahaan swasta (Holsti, 1967).

Ketidakstabilan domestik juga turut mempengaruhi para penguasa dalam mengambil kebijakan luar negeri suatu negara, dimana ketidakstabilan tersebut dapat memicu kebijakan luar negeri yang bersifat ekspansif dan agresif. Jenis rezim yang berkuasa di suatu negara baik dari segi politik maupun segi ekonomi turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut karena transparansi suatu rezim dapat mudah atau tidak adanya upaya untuk bisa memanipulasi opini publik (Holsti, 1967).

Besarnya tidaknya populasi dari suatu negara juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut, dimana negara-negara yang memiliki populasi yang besar cenderung rentan terhadap perang daripada negara-negara berpenduduk lebih kecil. Tingkat pembangunan di suatu negara juga turut mempengaruhi kebijakan luar negerinya, kondisi tersebut membuat kebijakan luar negeri antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara penghasilan rendah dapat berbeda (Akbar & Nuraeni, 2023). Faktor

opini publik mungkin merupakan faktor yang rumit yang dapat menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara. Terlebih pula, karakteristik dari sistem-sistem politik di setiap negara juga berbeda-beda, hal ini mengakibatkan agak sulitnya menggeneralisasi faktor opini publik, karena terdapat negara yang memiliki pemerintahan demokratis ataupun otoriter yang pastinya berbeda (Holsti, 1967). Menurut Alden & Aran, opini publik secara luas adalah istilah yang meliputi berbagai kelompok kepentingan, lobi maupun masyarakat yang umum (Alden & Amnon, 2017). Selain itu, Holsti berpendapat bahwa interaksi antara tekanan publik dan keputusan resmi juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri (Holsti, 1967).

Mengenai faktor eksternal, Holsti menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya yakni tujuan dan tindakan negara lain, dimana situasi yang ada diluar negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu negara, yang akhirnya dapat menentukan upaya perumusan kebijakan luar negeri antara dua pemerintahan negara atau lebih. Tren dan struktur sistem juga ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu negara, berbagai pemerintahan negara di dunia harus saling bekerjasama dalam berbagai hal melihat dunia yang semakin global dan saling bergantung satu sama lain (Holsti, 1967).

Struktur kekuasaan dan pengaruh dalam sistem juga menyediakan sekumpulan biaya, peluang dan risiko, dimana struktur

dalam sistem internasional membatasi kemampuan yang dimiliki oleh komponen-komponen dalam sistem tersebut. Efek nilai sistemik juga mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, dimana nilai-nilai nasional atau lokal yang dianut oleh sebuah negara dapat berubah seiring dengan perubahan di luar negara atau tingkat internasional (Holsti, 1967).

Berdasarkan uraian mengenai analisis kebijakan luar negeri, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep dari Holsti untuk membantu penulis menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan New Zealand di Pasifik Selatan. Secara spesifik, melalui konsep ini dapat dilihat aspek-aspek yang berperan dalam tindakan (kebijakan) New Zealand terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim.

2. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Iklim dalam arti sempit ialah cuaca rata-rata atau spesifiknya sebagai deskripsi statistik dalam hal rata-rata atau variabilitas kuantitas yang relevan selama periode waktu mulai dari beberapa bulan hingga ribuan atau jutaan tahun. Periode klasik untuk rata-rata variabelnya adalah 30 tahun, seperti yang diidefinisikan oleh *World Meteorological Organization* (WMO). Variabel yang digunakan biasanya suhu, curah hujan dan angin. Sedangkan iklim dalam arti

luas adalah keadaan, termasuk deskripsi statistik dari sistem iklim (IPCC, 2012).

Sistem iklim Bumi meliputi permukaan tanah, atmosfer, lautan dan es. Ilmuwan dari seluruh dunia telah mengumpulkan bukti bahwa iklim sedang berubah, perubahan ini terjadi lebih cepat daripada yang terjadi secara alami. Perubahan iklim ini terjadi akibat aktivitas manusia, kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengamatan dari satelit, balon cuaca, termometer di stasiun permukaan, inti es dan banyak jenis sistem pengamatan lainnya. Berbagai pengamatan independen memberikan gambaran yang konsisten mengenai dunia yang memanas (Wuebbles, 2018).

Pada dasarnya perubahan iklim terjadi secara alami, dalam enam dekade terakhir, aktivitas manusia dianggap sebagai faktor utama penyebab terjadinya perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahan fosil, deforestasi dan penggunaan bahan kimia CFC oleh manusia. Gas rumah kaca yang dipancarkan oleh aktivitas manusia mengubah keseimbangan energi bumi dan juga iklimnya. Diketahui bahwa aktivitas manusia saat ini mengemisikan sekitar 10 miliar ton karbon setiap tahun yang berasal dari pembakaran bahan fosil. Peningkatan gas karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen dioksida (N₂O) dan halokarbon di atmosfer menjadi pemicu naiknya suhu bumi (*global warming*) (Society, 2021).

Masyarakat di seluruh dunia sudah merasakan dampak dari meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, musim panas yang berkepanjangan serta kekeringan mempengaruhi kesehatan, pertanian, sumber daya air, energi dan infrastruktur transportasi. Realita pahitnya adalah perubahan iklim yang terjadi saat ini sudah berbahaya dan akan jauh lebih berbahaya dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim cenderung meningkatkan risiko dampaknya terhadap manusia dan peristiwa ekstrem yang lebih intens terkait perubahan iklim yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia (Wuebbles, 2018).

Saat ini, perubahan iklim seringkali disebut dengan krisis iklim, dalam esai *Oxford Languages*, krisis iklim didefinisikan sebagai situasi di mana tindakan mendesak diperlukan untuk mengurangi atau menghentikan perubahan iklim dan menghindari kerusakan lingkungan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan. Dalam perubahan iklim, terdapat dua jenis keadaan darurat yakni akut dan kronis. Keadaan krisis iklim akut menggambarkan kejadian cuaca buruk yang disebabkan atau diperburuk oleh perubahan iklim. Kejadian tersebut meliputi kebakaran hutan, angin topan, kekeringan dan gelombang panas, semua kejadian yang secara konvensional telah dianggap sebagai keadaan darurat (Corbett, 2021).

Hal ini juga mencakup kerusakan ekosistem yang cepat, berskala besar dan parah seperti pemutihan yang meluas pada terumbu

karang. Beberapa keadaan yang telah disebutkan diatas merupakan masalah mendesak yang menimbulkan kerugian besar dan nyata. Hal ini sering kali membutuhkan tanggapan dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan mitigasi dan perbaikan. Hubungan antara perubahan iklim dan keadaan darurat semakin jelas dengan semakin bahayanya gas rumah kaca yang terakumulasi di atmosfer dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang atribusi dampak iklim (Corbett, 2021).

Keadaan darurat iklim kronis menggambarkan perubahan iklim secara keseluruhan dengan bahaya dan ancaman yang signifikan dan membutuhkan tanggapan yang mendesak dan intensif. Hal ini dilihat secara luas oleh para ilmuwan, pemimpin bisnis dan hampir pemerintah nasional. Ancaman ini sangat sensitif terhadap waktu karena bahaya yang ditimbulkan akan semakin memburuk dengan bertambahnya pemanasan dan adanya risiko yang signifikan.

Beberapa pihak menyatakan bahwa perubahan iklim secara keseluruhan tidak memiliki tingkat urgensi yang dibutuhkan untuk sebuah keadaan darurat. Tidak seperti badai, perubahan iklim bergerak lambat, berlangsung selama bertahun-tahun dengan dampak yang semakin memburuk. Jika suatu negara memandang perubahan iklim sebagai keadaan darurat, hal ini merupakan masalah planet, oleh karena itu berada diluar kemampuan suatu negara untuk mengelolanya secara memadai. Gagasan tersebut tampaknya beralasan bahwa

perubahan iklim secara keseluruhan tidak dapat dianggap sebagai keadaan darurat karena perubahan iklim sangat lambat dan sangat besar.

Pemikiran ini bergantung pada pemahaman yang sempit tentang apa yang membuat keadaan darurat menjadi mendesak. Skala waktu dari sebuah keadaan darurat tergantung pada jenis krisis yang terjadi, dan banyak keadaan darurat yang berlangsung lambat dan lama. Skala waktu dari sebuah keadaan darurat tergantung pada jenis krisis yang terjadi, dan banyak keadaan darurat yang berlangsung lambat dan lama. Pandemi dan perang merupakan contoh dari keadaan darurat, dapat berlangsung selama bertahun-tahun atau puluhan tahun, dan mereka sering kali dikelola melalui cara-cara tata kelola yang luar biasa. Meskipun perang dan pandemi dapat berlangsung lama dan tampak tidak ada masalah, mereka juga dapat mengancam negara dan rakyatnya dengan bahaya dan gangguan massal dalam waktu singkat (Corbett, 2021).

Dalam keadaan darurat, waktu yang tersedia untuk menghadapi krisis yang mengancam kerusakan parah sangat terbatas. Oleh karena itu, urgensi relatif terhadap sifat ancaman dan persiapan yang diperlukan untuk menghadapinya. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat yang terburuk dari krisis iklim karena interaksi dengan ekosistem berlangsung bertahun-tahun, dampak dari krisis iklim ini tidak serentak dan tidak merata karena terdapat beberapa

tempat yang lebih sensitif terhadap iklim, keadaan akan mencapai klimaks bila tak ada upaya kebijakan dalam penanganan.

Maka dari itu, diperlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini dalam tindakan yang dikenal dengan mitigasi (*mitigation*) serta upaya penyesuaian (*adaptation*). Mitigasi meliputi pencarian cara-cara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca atau menahannya seperti pengurangan emisi dari pembangkitan listrik, pemanasan dan transportasi, meningkatkan efisiensi dan inovasi dibidang pertanian dan industri, penyerapan ke hutan atau penyerap karbon lainnya, serta mendukung praktik penggunaan lahan khususnya pembatasan deforestasi. Sedangkan adaptasi mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat dengan bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya atau memanfaatkan efek-efek positifnya (Rahmi & Yogica, 2018).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan pengukuran pasti. Pendekatan kualitatif mampu dijabarkan secara deskriptif analitik. Deskriptif analitik ialah penjabaran analisis oleh penulis melalui susunan kata-kata serta keterangan gambar. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti akan

membahas apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menghadapi krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam menghadapi krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam proses penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber elektronik lainnya yang bersifat kredibel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dipahami sebagai teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian melalui penelusuran dan pencatatan kajian literatur dengan topik yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan melalui penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, situs internet yang terkait dengan topik penelitian. Data melalui kajian literatur ini tentunya harus kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data ialah teknik analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis

menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah teknik yang dijelaskan melalui deskripsi fakta-fakta berdasarkan informasi yang didapatkan dalam proses penelitian. Melalui teknik ini, penulis akan mendeskripsikan informasi yang didapatkan dari data sekunder untuk menghasilkan analisis yang kredibel dan hasil yang optimal diakhir penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang dibagi ke dalam lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka memuat penjelasan lebih jauh mengenai konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dan teori yang akan digunakan adalah teori kebijakan luar negeri dan perubahan iklim.

BAB 3 Gambaran Umum membahas mengenai bagaimana kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menghadapi krisis perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan khususnya negara Fiji, Samoa dan Niue dan bagaimana kondisi perubahan iklim di New Zealand dan di kawasan Pasifik Selatan.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melewati proses pengujian hipotesis dengan berlandaskan pada data-data yang telah dikumpulkan. Penulis akan menjabarkan apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan *Pacific Reset* New Zealand dalam menghadapi krisis

perubahan iklim di negara-negara Pasifik Selatan khususnya negara Fiji, Samoa dan Niue dan implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan.

BAB 5 Kesimpulan berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep kebijakan luar negeri dan perubahan iklim. Secara spesifik, penjelasan akan mencakup keterkaitan antara konsep dan studi ilmu hubungan internasional. Selain itu, pada bagian ini juga akan dijelaskan tentang beberapa penelitian yang terkait dengan kebijakan *Pacific Reset* dari berbagai perspektif. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*)

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu bidang kajian dalam studi hubungan internasional. Kebijakan luar negeri menjadi sebuah studi yang cukup kompleks karena melibatkan aspek internal dan aspek eksternal suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan kebijakan luar negeri tetap menjadi unit utama dalam sistem hubungan internasional meskipun aktor-aktor non negara juga semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional (Yani, 2007). Hal ini mengacu pada strategi suatu negara dalam mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya di arena global. Studi kebijakan luar negeri berupaya memahami bagaimana negara berinteraksi satu sama lain dan aktor non negara dalam sistem internasional.

Ada berbagai definisi mengenai kebijakan luar negeri, Menurut Bruce Russett dan Harvey Starr, istilah *policy* secara umum diyakini sebagai pedoman untuk sebuah tindakan atau seperangkat tindakan yang

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkannya, yang melibatkan pilihan atau tindakan memilih (membuat keputusan) untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kata *foreign* menyiratkan unit-unit yang secara teritorial berdaulat yang berada di luar batas-batas legal dari negara tertentu. Maksudnya, apapun yang berada di luar batas teritorial yang legal, atau tidak berada dibawah otoritas legal negara bersangkutan adalah *foreign* (Khatimah, 2021).

Jadi *foreign policy* dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman untuk menentukan pilihan mengenai orang, tempat atau hal-hal yang ada diluar batas-batas negara yang bersangkutan (Bakrie, 2017). Dari definisi tersebut, bisa juga mempertegas bahwa selama kebijakan yang dibuat tidak melewati diluar batas-batas negara berarti itu merupakan kebijakan domestik.

Adapun definisi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Norman Padelford dan George Lincoln bahwa kebijakan luar negeri terdiri dari rencana tindakan (*courses of action*) yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas-batas yurisdiksinya sendiri. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah lebih dari sekadar kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditujukan pada negara tertentu (Khatimah, 2021).

Kebijakan luar negeri suatu negara memperhitungkan beberapa faktor seperti estimasi tentang kekuatan dan kapabilitasnya sendiri, prinsip-prinsip perilaku yang dianut negara itu, tujuan spesifik dari kepentingan nasional

yang ingin dicari dalam hubungan luar negeri, dan sebagainya. Kebijakan luar negeri juga mencakup strategi, komitmen dan taktik yang diambil untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan negara (Bakrie, 2017).

George Modelski mengemukakan definisi kebijakan luar negeri sebagai sistem aktivitas yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional (Bakrie, 2017). Perspektif ini melihat kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem dimana keputusan-keputusan politik luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan.

Para pengambil keputusan merupakan elemen penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri karena sistem aktivitas tersebut berhubungan dengan aktivitas-aktivitas lingkungan internasional. Selain itu, kapabilitas (kekuatan) negara untuk mengimplementasikan dan juga konteks dimana kebijakan luar negeri telah dirancang untuk diimplementasikan (Yetiv, 2022).

Menurut Deborah Gerner, kebijakan luar negeri adalah niat, pernyataan dan tindakan dari suatu aktor sering kali sebuah negara tapi tidak harus pada negara. Terdapat aktor-aktor lain seperti kelompok-kelompok kepentingan internasional, bisnis, agama, dan lain-lain dalam sistem internasional yang diarahkan ke dunia luar dan respon dari aktor-aktor lain terhadap niat, pernyataan dan tindakan tersebut (Neack, 2008).

Dari beberapa ahli yang menjelaskan perspektifnya mengenai definisi kebijakan luar negeri, ada perspektif minoritas dari Hermann bahwa kebijakan

luar negeri adalah tindakan-tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dihasilkan dari keputusan tingkat politik dari seorang individu atau sekelompok individu, dan ini adalah wujud yang dapat diamati dari keputusan tingkat politik. Kebijakan luar negeri bukan sebuah keputusan, melainkan produk dari keputusan. Secara singkat, kebijakan luar negeri adalah perilaku sebuah negara (Neack, 2008).

Andrew Heywood menjelaskan kebijakan luar negeri secara luas mengacu pada upaya pemerintah untuk mempengaruhi atau mengelola peristiwa diluar perbatasan negara, biasanya, tetapi tidak eksklusif, melainkan melalui hubungan mereka dengan negara lain (Heywood, 2013).

Disamping itu, terdapat juga definisi menurut Morin dan Paquin, kebijakan luar negeri adalah serangkaian tindakan atau aturan yang mengatur tindakan negara-negara politik independen yang digunakan di lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018). Pendapat ini, mirip dengan Christopher Hill yang mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri sebagai keseluruhan dari hubungan eksternal yang resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya suatu negara, tetapi tidak eksklusif dalam hubungan internasional).

Kebijakan luar negeri sebagai konsep telah berkembang seiring berjalannya waktu, dan saat ini mencakup berbagai isu seperti perdagangan, keamanan energi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan (Senadeera, 2023). Dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri, tentunya negara memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui interaksinya dengan negara

lain, tidak ada konsensus yang secara khusus menentukan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan luar negeri dan cara terbaik untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri. Disamping itu, tujuan kebijakan luar negeri juga terus berkembang dan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Akan tetapi, menurut Padelford dan Lincoln, ada beberapa tujuan yang sifatnya mendasar dan semua negara berusaha mencapainya, yakni : keamanan nasional, kemajuan ekonomi, meningkatkan kekuatan nasional dan prestise nasional (Bakrie, 2017).

Tujuan kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga tujuan yaitu tujuan jangka pendek bisa berupa sasaran-sasaran yang sifatnya mendesak, tujuan jangka menengah biasanya berupa sasaran yang bersifat strategis dan tujuan jangka panjang yang umumnya bersifat ideal dan hampir semua negara cenderung positif dan hampir mirip (Bakrie, 2017).

Sebagaimana diketahui, sistem internasional itu sangat kompleks, kita dapat melihat sistem internasional sebagai konstelasi negara-negara yang berinteraksi satu sama lain sehingga dalam melakukan analisis kebijakan luar negeri diperlukan unit analisis untuk menjelaskan suatu peristiwa internasional yang kemungkinan terdapat lebih dari satu faktor penyebab. Unit analisis awalnya dikembangkan oleh Kenneth Waltz melalui konsep *Three Images*. Terdapat tiga level unit analisis yang ada saat ini yaitu (Sorensen et al., 2022):

1. Tingkat sistem (*system level of analysis*)

Pada tingkat ini berfokus pada perbandingan dan interaksi antar negara, sebagai sekumpulan negara yang interaksinya dipandu oleh kemampuan relatif mereka atau lazim dikenal dengan sistem internasional. Kekuatan dan kekayaan suatu negara akan mempengaruhi mereka untuk bertindak dan untuk sukses di panggung global. Atribut-atribut relatif ini dapat berubah seiring berjalannya waktu ketika ekonomi suatu negara menghasilkan lebih banyak kekayaan atau saat negara tersebut mencapai kapasitas teknologi atau militer. Hal sebaliknya juga bisa terjadi seperti negara-negara dapat kehilangan sekaligus mendapatkan kekuatannya.

Perubahan dalam kemampuan relatif negara dapat menciptakan peluang tetapi juga dapat meningkatkan hambatan bagi negara, peningkatan kapasitas militer dapat memperkuat suatu negara sementara ekonomi dunia yang semakin bergantung bisa menimbulkan kendala bagi sebuah negara. Menurut Kalevi Holsti, variabel-variabel pokok yang dapat digunakan untuk mengenali sistem internasional, yaitu batas-batas lingkungan sistem internasional, struktur kekuatan, kekuasaan dan pengaruh serta struktur kepentingan dan bentuk-bentuk atau pola-pola hubungan internasional.

2. Tingkat negara-bangsa (*state level of analysis*)

Tingkatan ini menekankan sifat dan karakteristik masing-masing negara dalam mengevaluasi dinamika politik global dan sistem internasional. Menurut Russel Bova terdapat lima variabel pada tingkatan negara yang dapat mempengaruhi perilaku suatu negara terhadap dunia global yakni jenis pemerintahan, sistem ekonomi dan kinerjanya, ciri khas nasional, identitas budaya, kelompok kepentingan dan opini publik.

3. Tingkat pengambil keputusan individu (*individual level of analysis*)

Tingkat ini melihat bagaimana peran individu dalam masyarakat internasional. Tingkat ini berasumsi bahwa individu-individu membentuk jalannya sejarah karena pilihan dan keputusan merekalah yang mendorong terjadinya peristiwa. Menganalisis suatu peristiwa internasional menggunakan tingkatan ini, para pembuat keputusan (*decision makers*) diasumsikan sedang menetapkan tujuan, memilih berbagai sebab-sebab tindakan dan mendayagunakan kapabilitas nasional untuk mencapai tujuan atas nama negaranya.

Menurut John Rourke dan Mark Boyer, terdapat lima faktor idiosinkratik jika ingin menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara menggunakan tingkatan individu ialah faktor

kepribadian, faktor kesehatan fisik dan jiwa, faktor ego dan ambisi, faktor sejarah politik dan pengalaman pribadi dan faktor persepsi dan realitas personal.

Dalam hubungan internasional, sebuah teori mengenai kebijakan luar negeri sebagai dasar dan arah sebuah analisis. Weber menyatakan bahwa kebijakan luar negeri dalam politik internasional dapat mencakup banyak aspek dari perang ke revolusi, masalah gender, hak asasi manusia dan perdagangan bebas. Weber juga menjelaskan bahwa bagaimana cara kerja sebuah teori hubungan internasional sebagai teori yang tidak hanya menggambarkan keadaan politik internasional, namun juga menekankan pandangan dari teori tersebut mengenai keadaan dunia dimana politik internasional itu terjadi.

Skripsi ini akan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya *pacific reset* dan bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri oleh K.J Holsti. Menurutnya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sebuah kebijakan yaitu sebagai berikut (Holsti, 1967) :

a. Faktor Internal

1. Nilai, kebutuhan dan tradisi birokratis

Pejabat dalam organisasi pembuat kebijakan sering kali berfokus pada usulan garis besar tujuan, sementara pejabat yang lebih rendah mendefinisikan tujuan-tujuan khusus berdasarkan nilai-nilai dan tradisi mereka sendiri. Dalam suatu krisis, keputusan dibuat dengan cepat

berdasarkan informasi yang terbatas, rumor, dan pandangan penasihat tingkat atas. Proses birokrasi dan politik di dalam suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk tujuan, keputusan, dan tindakan.

Hasil kebijakan dipengaruhi oleh tawar-menawar dan persaingan di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan kepemimpinan politik tingkat atas mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kebijakan yang dirumuskan oleh mekanisme antar departemen. Politik birokrasi dapat mengarah pada pemaksaan solusi independen, sabotase terhadap tujuan pimpinan tertinggi, atau pemeliharaan perdamaian melalui kesepakatan implisit antar birokrasi.

2. Kebutuhan sosial dan atribut

Tujuan, keputusan, dan tindakan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebutuhan sosial, kepentingan dalam negeri, persaingan dengan negara lain, pertimbangan gengsi, dan tekanan dari kelompok-kelompok swasta. Selain itu, karakteristik geografis, demografis, dan sumber daya suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk tujuan kebijakan luar negerinya. Karakteristik ini berdampak pada pembangunan sosial ekonomi, kebijakan militer dan pertahanan suatu negara, serta akses ke wilayah lain di dunia. Interpretasi dan pengejaran tujuan kebijakan luar negeri dapat bervariasi di antara berbagai partai politik atau pemerintah.

3. Ketidakstabilan domestik

Bahwa proposisi ketidakstabilan dalam negeri menyebabkan ekspansi ke luar negeri dan perilaku diplomatik yang tidak bersahabat masih diperdebatkan. Beberapa orang berpendapat bahwa para pemimpin negara berkembang mungkin terlibat dalam kebijakan luar negeri yang agresif untuk mengalihkan perhatian dari perpecahan internal. Namun, bukti-bukti historis tidak terlalu mendukung proposisi ini. Berbagai penelitian menemukan hubungan yang lemah antara konflik dalam negeri dan perilaku kebijakan luar negeri, dan tidak ada hubungan yang signifikan yang ditemukan bahkan dengan analisis data yang komprehensif.

4. Jenis rezim

Rezim politik atau ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi agresivitas nasionalnya, sistem tertutup, seperti rezim totaliter atau otoriter, dapat menjaga kerahasiaan dan memanipulasi opini publik untuk mendapatkan dukungan bagi kebijakan berisiko tinggi atau peralihan tujuan secara tiba-tiba. Kediktatoran dapat terlibat dalam ekspansi ke luar negeri untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, sementara para pemimpin karismatik dapat mencari kepuasan pribadi atau prestise internasional.

Terdapat pola hubungan yang berbeda antara perilaku konflik internal dan eksternal untuk berbagai jenis rezim. Namun, terdapat temuan yang kontradiktif dan ketidakpastian dalam analisis kebijakan luar negeri.

Ukuran negara, dan bukan jenis rezim, dapat menjelaskan perbedaan dalam tindakan konflik.

5. Ukuran negara

Ukuran sebuah negara, yang diukur berdasarkan jumlah penduduk, memainkan peran penting dalam membentuk tindakan kebijakan luar negerinya. Negara-negara besar cenderung lebih cenderung menggunakan kekuatan dan memulai konflik, sementara negara-negara kecil lebih cenderung menggunakan organisasi internasional dan terlibat dalam upaya kebijakan luar negeri bersama. Negara-negara besar juga memiliki lebih banyak tujuan dan tugas dalam politik internasional karena kemampuan dan kekuatan mereka yang lebih unggul. Namun, kurangnya kemampuan tidak serta merta menghalangi sebuah negara untuk mengejar tujuan revolusioner yang luas. Jenis dan jumlah tujuan yang dikejar oleh sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kapabilitasnya.

6. Tingkat Pembangunan

Tingkat pembangunan suatu negara tidak menentukan keterlibatannya dalam isu-isu politik dan ekonomi internasional. Negara-negara kecil yang sudah maju mungkin lebih terlibat daripada negara-negara berkembang, tetapi mereka tidak selalu memprakarsai lebih banyak konflik atau tindakan kooperatif. Satu-satunya perbedaan yang signifikan dalam tindakan luar negeri dan konsepsi peran nasional adalah ukuran dan kemampuan suatu negara. Namun, temuan-temuan ini didasarkan pada data dari tahun 1950-an dan 1960-an, dan ada kemungkinan bahwa tingkat

pembangunan dapat menjadi faktor untuk tindakan kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif atau agresif pada tahun 1980-an.

7. Opini Publik

Hubungan antara opini publik dan kebijakan luar negeri pemerintah sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada masyarakatnya. Opini publik yang terinformasi dapat mempengaruhi keputusan pemerintah, tetapi sikap publik sering kali tidak terinformasi dan resisten terhadap perubahan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang politik internasional memiliki keberhasilan yang terbatas. Tingkat ketertarikan dan pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu politik luar negeri bervariasi, dengan sebagian kecil masyarakat yang memiliki perhatian lebih besar akan lebih terinformasi dan terlibat. Dampak opini publik terhadap pengambilan keputusan tergantung pada isu dan situasi umum, dengan pengaruh yang lebih besar pada masa krisis atau konflik. Pada akhirnya, opini publik menetapkan batas-batas alternatif kebijakan tetapi tidak mendikte tindakan-tindakan tertentu.

8. Interaksi antar tuntutan publik dan keputusan resmi

Interaksi antara tuntutan publik dan keputusan resmi dalam kebijakan luar negeri melibatkan interaksi yang kompleks antara pejabat pemerintah dan publik. Pemerintah memiliki keuntungan dalam menafsirkan realitas kepada publik dan menciptakan sikap, opini, dan citra yang sebelumnya tidak ada. Informasi atau propaganda dari sumber yang

kredibel atau bergengsi memiliki dampak yang lebih besar terhadap opini publik daripada informasi dari sumber yang kurang kredibel.

Perubahan sikap publik cenderung mengikuti tindakan pemerintah, yang mengindikasikan bahwa pemerintah berperan dalam menciptakan "suasana hati" yang juga membatasi mereka. Dalam sistem politik di mana semua informasi dikontrol oleh pemerintah, opini publik memainkan peran dominan sebagai pendukung. Dalam masyarakat seperti itu, individu memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber informasi independen dan tidak diizinkan untuk mengekspresikan pendapat yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bebas untuk mengubah tujuannya tanpa hambatan.

b. Faktor Eksternal

1. Tujuan dan Tindakan Negara Lain

Tindakan kebijakan luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh tujuan dan tindakan negara lain serta perubahan kondisi dan tren dalam sistem internasional, interpretasi informasi dan sinyal dari pemerintah lain sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri.

Tindakan dan tujuan negara lain dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri pemerintah. Pemerintah sering kali merespons tujuan dan tindakan negara lain, serta perubahan kondisi dan tren dalam sistem internasional. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan tertentu sebagai tanggapan atas perilaku agresif negara lain atau untuk melindungi

kepentingannya sendiri dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Jenis respons ini sering kali bersifat timbal balik, yang berarti bahwa tindakan kebijakan luar negeri pemerintah cenderung mencerminkan stimulus yang diterimanya. Interpretasi informasi dan sinyal dari pemerintah lain sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Para pembuat kebijakan harus menganalisis dan memahami maksud dan motivasi di balik tindakan negara lain. Interpretasi ini dipengaruhi oleh sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai dari pembuat kebijakan itu sendiri.

Singkatnya, tindakan dan tujuan negara lain memainkan peran penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri pemerintah. Pemerintah merespons tujuan dan tindakan negara lain, serta perubahan kondisi dan tren dalam sistem internasional. Interpretasi informasi dan sinyal dari pemerintah lain sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri, dan interpretasi ini dipengaruhi oleh sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai para pembuat kebijakan.

2. Tren Sistem dan Struktur

Dunia yang mengglobal saat ini, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan mereka agar selaras dengan tren global. Saling ketergantungan ekonomi berarti bahwa faktor-faktor seperti suku bunga dan keputusan *Organization of the Petroleum Exporting*

Countries (OPEC) dapat berdampak pada tingkat pengangguran dan inflasi. Selain itu, negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah memiliki kendali terbatas atas kondisi ini karena struktur kekuasaan dan pengaruh dalam sistem internasional. Perubahan dalam sistem internasional dapat mengarah pada tujuan dan tindakan baru bagi pemerintah.

3. Efek dan Sistemik

Lingkungan eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan dan nilai suatu negara. Di masa lalu, tujuan seperti otoritas kerajaan dan pembangunan kerajaan sangat diutamakan, tetapi saat ini, penentuan nasib sendiri, kemandirian politik, dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai nilai yang penting. Industrialisasi dan kemajuan teknologi dipandang sebagai hal yang krusial bagi status suatu negara, dan banyak pemerintah mengadopsi tujuan industrialisasi karena negara lain telah melakukannya.

Setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan memiliki berbagai kepentingan didalamnya. Dalam konteks lingkungan, kebijakan lingkungan dan kebijakan luar negeri saling berkaitan, hal ini merepresentasikan bagaimana sebuah negara terlibat dengan negara lain dan organisasi internasional dalam isu-isu lingkungan. *Environmental policy* atau kebijakan lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan cara terbaik untuk mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan alam demi keuntungan bersama. Definisi

ini menggambarkan karakter lingkungan yang tidak terbatas sebagai bidang kebijakan publik yang berbeda yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan modern (Benson & Jordan, 2015).

Masifnya degradasi lingkungan yang terjadi saat ini memerlukan kesadaran dunia internasional bahwa apa yang terjadi saat ini mengancam eksistensi seluruh manusia. Pembahasan mengenai upaya untuk menjaga lingkungan cenderung dipandang bertentangan dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang selama ini banyak berkaitan dengan pemanfaatan yang menimbulkan efek pada lingkungan. Menurut beberapa kalangan, degradasi lingkungan yang terjadi merupakan implikasi dari cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungannya (Tamma, 2021).

Terdapat kajian etika lingkungan yang dikenal dengan antroposentrisme dan ekosentrisme, antroposentrisme secara harfiah berarti berpusat pada manusia, hal ini mengacu pada kerangka kerja etis yang memberikan kedudukan moral semata-mata pada manusia (Cochrane, 2008). Artinya, manusia dengan segala kepentingannya untuk mendukung dan mempertahankan kehidupannya ialah hal yang akan menentukan tatanan ekosistem dan kebijakan apa yang akan diambil terkait lingkungan.

Sehingga, semua hal yang ada di alam semesta hanya akan dilihat memiliki nilai apabila keberadaannya dapat menunjang kepentingan hidup manusia. Pandangan demikian terhadap lingkungan diyakini

sebagai implikasi pada perilaku manusia yang eksploitatif dalam memanfaatkan alam yang dirangkaikan sebagai aspek pendukung bagi kepentingan manusia (Tamma, 2021).

Pandangan inilah yang membuat manusia berupaya untuk memenuhi kepentingannya dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang akhirnya berpengaruh pada kondisi dan daya dukung alam sebagai lingkungan tempat tinggal manusia. Berbeda dengan ekosentrisme dimana manusia tidak dipandang sebagai pusat dari alam semesta tetapi manusia merupakan bagian dari alam semesta. Perhatian utama diletakkan pada pemahaman bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan dan memberikan perhatian pada upaya pemenuhan kepentingan yang sifatnya jangka panjang (Nanlohy, 2020).

Pandangan ekosentrisme dalam memenuhi kepentingan dan mewujudkan tujuan manusia dengan cara mengintegrasikan tujuan dan kepentingannya dengan spesies yang lain. Manusia harus mampu memanfaatkan alam untuk mendukung eksistensi kehidupannya tetapi disisi lain manusia harus bisa mencegah sikap eksploitatif terhadap alam, dalam artian mengambil sumber daya alam secara bijak (Tamma, 2021).

Hingga saat ini, dua etika lingkungan yang berkembang masih menjadi perdebatan. Terlihat ada upaya yang dilakukan suatu

kelompok untuk menjaga lingkungan melalui pandangan ekosentrisme tetapi perilaku dominan yang kelihatan ialah antroposentrisme. Hal ini terlihat dari pola produksi yang awalnya suatu barang diproduksi karena dibutuhkan untuk menopang kebutuhan manusia, tetapi saat ini cenderung pada suatu barang seringkali diproduksi untuk memenuhi ego manusia untuk memiliki secara berlebihan dibanding dari yang dibutuhkan. Adanya pergeseran dalam alasan mendasar produksi atas barang dimana awalnya diproduksi atas dasar kebutuhan manusia sehingga hasil produksi memiliki manfaat dalam konteks kebutuhan manusia (Tamma, 2021).

Akan tetapi, ketika sistem produksi berubah terutama dalam kerangka kapitalis yang mendorong produksi barang secara masif, kecenderungan yang timbul ialah manusia diarahkan pada kondisi untuk menerima hasil produksi sebagai kebutuhan. Ketika hasil produksi didorong untuk membentuk kebutuhan, maka sistem produksi massal menjadi sesuatu yang menguntungkan dan mendorong manusia dalam memaksimalkan produksi alih-alih memaksimalkan pemenuhan kebutuhan. Pola yang terjadi ini pada akhirnya berkontribusi pada masalah lingkungan yang saat ini semakin meluas, degradasi lingkungan terjadi sudah sejak lama tetapi hal itu dipercepat dengan pemenuhan kebutuhan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi semata (Tamma, 2021).

Besarnya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang belum pernah terjadi sepanjang abad ke-20 juga telah menghasilkan penurunan kualitas lingkungan yang nyata. Banyak kementerian lingkungan hidup nasional dan *the United Nations Environment Programme* (UNEP) terbentuk diperiode ini. Kebijakan-kebijakan yang diadopsi kebanyakan bersifat peraturan, menentukan proses dan standar emisi. Di negara-negara dengan sistem administrasi yang kurang berkembang, periode awal ini merupakan masa pengembangan standar dasar untuk polusi udara air, limbah dan polusi suara (Benson & Jordan, 2015).

Sejak masa-masa awal hingga sekitar akhir tahun 1980-an, desakan berasal dari keprihatinan terhadap degradasi lingkungan hidup pada skala nasional dan regional, dan hampir semua kebijakan dan undang-undang lingkungan hidup diberlakukan, dengan demikian undang-undang lingkungan masih bersifat skala nasional dalam cakupan dan ruang lingkupnya, seperti Konvensi Barcelona tahun 1976 dari UNEP untuk melindungi Mediterania. Akan tetapi, sekitar tahun 1980-an perhatian mulai bergeser dari perubahan lingkungan yang berskala nasional ke perubahan kualitas lingkungan yang bersifat transnasional atau jangkauan secara global yang kemudian muncul secara berurutan untuk mengatasi polusi laut, hujan asam, penipisan ozon dan pengiriman limbah berbahaya (Benson & Jordan, 2015).

Selama tahun 1990-an, fase baru pembuatan kebijakan internasional muncul dari kesepakatan yang dibuat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB di Rio yaitu *Rio Earth Summit* (1992). Yang paling signifikan ialah Konvensi PBB *Biological Diversity and a Framework Convention on Climate Change* telah disepakati, kemudian *Kyoto Protocol* (1997) yang bertujuan untuk membatasi emisi iklim global (Cocklin, 2009).

Sejarah perjanjian internasional tentang lingkungan dapat ditelusuri kembali ke tahun 1940-an, tetapi setelah tahun 1980, jumlah perjanjian traktat dan konvensi semakin banyak dan mengarah pada internasionalisasi kebijakan lingkungan. Kebijakan internasional dalam ranah apa pun bisa menjadi sulit karena, menurut Timothy O'Riordan bahwa kebijakan ini mengharuskan negara-negara untuk menyerahkan dalam beberapa hal kedaulatan mereka yaitu kebebasan untuk bertindak sebagai negara berdaulat harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati kepentingan yang sah dari negara-negara berdaulat lainnya (Cocklin, 2009).

Agar hal tersebut dapat terjadi, ia menyarankan tiga kondisi yang harus dipenuhi yang pertama adalah keuntungan bersama yang membutuhkan pengakuan dari semua negara bahwa kerja sama dan kepatuhan lebih baik daripada jika satu atau beberapa negara tidak mematuhi kesepakatan bersama; yang kedua ancaman yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa ada ilmu pengetahuan yang diterima

terkait dengan ancaman lingkungan dan ketidakpatuhan tidak sesuai dengan kepentingan negara secara individu maupun kolektif; yang ketiga adalah penegakan yang kredibel yaitu pengakuan di antara negara-negara bahwa kepatuhan akan ditegakkan dan ketidakpatuhan akan dihukum (Cocklin, 2009).

Apa yang dijabarkan oleh Timothy O’Riordan membantu kita memahami mengapa, pada tingkat sederhana lebih mudah mendapatkan kesepakatan internasional untuk beberapa masalah daripada masalah lainnya. Dalam kasus penipisan ozon misalnya, ilmu pengetahuannya relatif jelas (ancaman dapat dipercaya) dan cukup jelas bahwa sebagian besar negara berada dalam risiko pada tingkat tertentu dari semakin membesarnya lubang di lapisan ozon (keuntungan bersama) (Cocklin, 2009).

Sebaliknya, sudah sejak lama terdapat keraguan mengenai ilmu pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan bahkan terdapat pengakuan bahwa beberapa negara akan mendapatkan keuntungan dari pemanasan global (beberapa negara di belahan bumi utara seperti Kanada dan Rusia). Kedua ambisi ini membantu dalam menjelaskan mengapa sangat sulit untuk mencapai kesepakatan internasional dalam membatasi emisi gas rumah kaca (Cocklin, 2009).

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang terus menjadi perhatian dalam hal kebijakan dan peraturan lingkungan internasional,

dan ada pengakuan luas kepatuhan pada dasarnya bersifat sukarela, karena hal itu tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk menghukum ketidakpatuhan. Namun, pengaruh internasional terhadap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup telah meningkat secara nyata selama tiga dekade terakhir, dengan banyaknya ancaman utama terhadap kualitas lingkungan hidup yang berasal dari luar negeri dan memiliki konsekuensi global, agenda kebijakan lingkungan hidup tidak dapat dipungkiri akan tetap merupakan perwujudan penting dari proses globalisasi (Benson & Jordan, 2015).

B. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Istilah perubahan iklim atau *climate change* digunakan untuk menggambarkan fenomena perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata iklim lokal, regional dan global Bumi. Pada dasarnya banyak perdebatan mengenai penggunaan istilah ini, menurut Demetris Koutsoyiannis penggunaan istilah ini tidak ilmiah tetapi politis, hal itu ditunjukkan oleh beberapa pengamatan salah satunya ialah banyaknya sidang kongres Amerika Serikat yang membahas perubahan iklim. Selain itu, item paling awal dalam koleksi Google Books yang menyertakan istilah “*climate change*” dalam judulnya ialah laporan Perang Dingin oleh CIA pada tahun 1976 yang merujuk ke negara Uni Soviet, didalam laporan tersebut *climate change* diartikan sebagai mendinginnya Belahan Bumi Utara sejak tahun 1940 (Koutsoyiannis, 2021).

Dikutip dari buku *Global Politics* oleh Andrew Heywood bahwa penggunaan istilah perubahan iklim berangsur-angsur menggantikan *global warming* dalam diskusi resmi tentang fenomena tersebut pada tingkat nasional dan internasional. Walaupun mungkin ada alasan ilmiah untuk memilih istilah perubahan iklim (seperti, istilah ini memungkinkan adanya kemungkinan bahwa temperatur dapat turun atau naik), istilah ini tidak terlalu menakutkan daripada *global warming* (lebih emosional dan memiliki konotasi bencana yang melekat). Istilah perubahan iklim yang hambar dan netral sepertinya lebih disukai para politisi dan negara yang enggan mengambil tindakan segera atas masalah ini (Heywood, 2013). Kedua pendapat diatas, sepakat bahwa istilah perubahan iklim digunakan dalam agenda politik ataupun kebijakan publik.

Terlepas pendapat dua ahli sebelumnya, ada pendapat dari Charlotte Werndl bahwa pendefinisian perubahan iklim bukan hal yang sepele dan penuh perdebatan. Dalam wacana publik maupun ilmiah, istilah perubahan iklim sering digunakan secara luas dan masih belum jelas apa yang sebenarnya dipahami oleh mereka. Ketidakjelasan ini bisa menjadi masalah karena dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai bagaimana keberadaan dan tingkat pemanasan global. Bagaimana mendefinisikan perubahan iklim secara konseptual menarik, tetapi memilih definisi yang baik cukup penting untuk dapat membuat pernyataan yang benar mengenai sistem iklim kita (Werndl, 2016).

Sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Mike Hulme, menurutnya ide perubahan iklim itu bermacam-macam, tidak ada satupun penjelasan komprehensif tentang perubahan iklim yang dapat memberikan keadilan penuh terhadap manifestasi fisik, wacana politik dan kekuatan imajinatif dari fenomena tersebut (Hulme, 2021). Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada pendefinisian perubahan iklim secara paten yang independen tanpa dikaitkan dengan politik.

Walaupun demikian, sudah banyak pernyataan mengenai perubahan iklim yang terjadi saat ini dari asosiasi ilmiah, akademi ilmu pengetahuan, badan antar pemerintah serta organisasi ilmiah. Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang telah *peer-reviewed* (menggambarkan keakuratan dan konsensus hasil penelitian) memperlihatkan bahwa tren perubahan iklim selama satu abad terakhir sangat mungkin disebabkan oleh percepatan pelepasan karbondioksida dan polutan lainnya ke atmosfer selama proses pertanian dan industri yang dilakukan manusia serta ekstraksi, produksi yang berkelanjutan dan konsumsi bahan bakar fosil.

Perubahan iklim yang awalnya dilihat sebagai isu yang sepenuhnya ilmiah berubah menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan dalam beberapa waktu terakhir berubah menjadi sesuatu yang lebih besar yaitu krisis iklim. Term *climate crisis* digunakan untuk menunjukkan rasa darurat dan urgensi yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Maksudnya, iklim tidak hanya berubah tetapi juga menyebabkan krisis dan jika manusia tidak mengambil tindakan, konsekuensinya bisa menjadi bencana besar. Oleh karena itu,

climate crisis sering juga disebut dengan *climate emergency* karena merujuk kepada rasa darurat dan urgensi yang besar. Dalam literatur mengenai krisis dan keadaan darurat, *climate emergency* umumnya dipahami sebagai sesuatu yang tiba-tiba dan sampai batas tertentu yang tidak terduga dengan sifat bahaya dan kesegeraan yang menuntut tindakan segera (Henman et al., 2023).

Namun, tidak ada pemahaman yang sama mengenai keadaan darurat iklim di antara para ahli. Misalnya, menurut Howard dkk perubahan iklim sebagai keadaan darurat yang lambat (Howarth et al., 2021), menurut Patterson dkk keadaan darurat menekankan sifat ancaman yang berbahaya, berlangsung secara perlahan dan bersifat global (Patterson et al., 2021) dan gagasan ‘krisis yang merambat’ oleh Boin dkk mengacu pada sifat perubahan iklim sebagai ancaman yang muncul secara perlahan, krisis ini tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Apa yang tampak seperti ‘fase panas’ mungkin hanya merupakan pendahulu dari fase yang lebih panas atau pendinginan bertahap dari ancaman (Boin et al., 2021). Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keadaan darurat bersifat lambat dan terjadi secara perlahan.

Terdapat pandangan luas di komunitas ilmiah bahwa dunia sedang menghadapi keadaan darurat iklim. Pada bulan januari tahun 2020, dengan merujuk pada tren yang mengkhawatirkan di seluruh proses sistem bumi, peringatan darurat iklim ditandatangani oleh lebih dari 11.000 ilmuwan yang mendesak para pengambil keputusan dan seluruh umat manusia untuk mendeklarasikan keadaan darurat iklim secara luas agar para pengambil

keputusan, sektor swasta dan masyarakat umum memahami besarnya krisis ini, melacak kemajuan dan menyelaraskan kembali prioritas untuk mengurangi perubahan iklim (Ripple et al., 2022). Dengan hal ini, perubahan iklim sebagai keadaan darurat diyakini dapat mempercepat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Secara khusus, konsep keadaan darurat disarankan untuk membantu perubahan transformatif dengan menciptakan kondisi untuk respons kebijakan yang lebih komprehensif dengan memberikan harapan dan inspirasi serta dengan meningkatkan keterlibatan warga negara. Akan tetapi, pandangan umum yang ada ialah meskipun konsep keadaan darurat dapat bermanfaat, namun hal ini tergantung konteksnya. Untuk memperhitungkan dampaknya, perhatian harus diberikan pada lanskap sosial, politik, geografis yang bersangkutan (Henman et al., 2023).

Mengutip pendapat Muhammad Hasan bahwa perubahan iklim dan krisis iklim yang diakibatkan telah dilihat melalui lensa ilmiah dalam hal emisi gas rumah kaca, bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Meskipun isu-isu ini merupakan inti dari masalah ini, namun sifat kompleks dari krisis ini yang berdampak pada pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan ketidakadilan sistemik tidak dapat diabaikan. Keadilan iklim menyusun kerangka krisis iklim dalam konteks hak asasi manusia dan berfokus pada kelompok yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim untuk memastikan kebijakan yang adil untuk mengatasi dampak pemanasan global. Kelompok rentan yang dimaksud disini ialah negara-negara berpenghasilan

rendah (*Lower Income Countries*) karena mereka memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam (Hasan, 2022).

Keadilan iklim bertujuan untuk menghasilkan kebijakan iklim yang adil melalui strategi mulai dari mendanai negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengadopsi praktik-praktik pembangunan berkelanjutan hingga mendekolonisasi narasi perubahan iklim dengan melibatkan negara-negara ini dalam kebijakan untuk membatasi pemanasan global (Benson & Jordan, 2015).

Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Leilani Nishime bahwa studi komunikasi memainkan peran penting dalam respon kita terhadap krisis iklim, bidang komunikasi berfokus pada cara terbaik untuk menyampaikan informasi yang jelas, bermakna dan berbasis ilmu pengetahuan. Para ahli komunikasi lainnya telah berkontribusi pada kemampuan ahli komunikasi untuk membujuk audiens dan memperhatikan dimensi afektif dari pesan krisis iklim. Leilani Nishime juga menekankan perhatian pada kekuasaan dan memusatkan pada masyarakat yang terpinggirkan karena merekalah yang paling terdampak oleh krisis iklim (Nishime, 2023).

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sibel Hoşut and Seçil Deren Van Het Hof bahwa pentingnya hubungan sosial dan komunikasi efektif dalam menghadapi perubahan iklim sebagai permasalahan global, multidimensi dan kompleks yang terkait dengan aktivitas manusia.

Melakukan segmentasi pemangku kepentingan dalam publik sesuai dengan tingkat keterlibatan, pengenalan kendala untuk masalah yang sama dapat menjadi pendekatan yang berguna dalam mengelola dan mengkomunikasikan informasi lingkungan secara efektif. Cara yang mudah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang tindakan komunikatif dan menjangkau publik melalui strategi komunikasi yang efektif dengan menggunakan teori Harold D. Lasswell (1948) (Hoşut & Hof, 2021).

Sebagai ancaman yang krusial, perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh tindakan satu kelompok atau pola hidup individu. Diperlukan keterlibatan, kesadaran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terutama dari pemerintah, lembaga publik, bisnis, industri, komunitas, lembaga swadaya masyarakat dan media.

C. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada tabel dibawah merupakan rujukan yang digunakan penulis dalam mengemukakan hipotesis sementara yang kemudian dapat mempengaruhi arah dan hasil dari penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi tolak ukur penulis untuk menganalisis karakteristik variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipilih sebagai rujukan dalam penelitian, yaitu :

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thomas McDowall pada tahun 2019 dengan judul “*The Pacific Reset a Retroliberal Analysis*” meneliti

tentang perubahan rezim bantuan pada negara New Zealand, dari hasil analisis, retroliberalisme sebagai gagasan yang menggabungkan pemikiran pembangunan dan kebijakan lama memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai *Pacific Reset* menggambarkan pergeseran fokus, modalitas dan pemikiran tentang bantuan.

Pacific Reset sejalan dengan beberapa prinsip retroliberalisme, *Pacific Reset* mencakup elemen-elemen yang khas dari rezim bantuan neostruktural terutama dalam retorika dan penyertaan prioritas tematik kesehatan dan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh fokus yang lebih modernis pada geopolitik di wilayah tersebut dan mempertahankan mekanisme retroliberal yang menyalurkan pembangunan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Anna Powles pada tahun 2021 yang berjudul “*Identity, national security and influence: The ‘Pacific Reset’ and shaping New Zealand’s relations with the Pacific islands*” membahas terkait bagaimana identitas, keamanan nasional dan pengaruh dalam membentuk hubungan New Zealand dengan negara-negara di Pasifik Selatan, Powles menemukan bahwa *Pacific Reset* berusaha untuk memajukan ambisi strategis New Zealand di Pasifik Selatan dengan memproyeksikan kemudahan dan kepercayaan diri untuk terlibat dengan Pasifik Selatan dalam hal pengaruh dan identitas negara serta keamanan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Mark Simon pada tahun 2022 berjudul “*New Zealand’s public diplomacy in the Pacific: a reset, or more*

of the same?” penelitian ini membahas sejauh mana diplomasi publik New Zealand dalam kerangka *Pacific Reset* yang menekankan keterlibatan, kemitraan dan kolaborasi. Mark menjelaskan bahwa New Zealand menganggap diplomasi publik sebagai elemen penting dalam upaya-upaya yang dilakukan di Pasifik.

New Zealand memiliki tim diplomasi publik yang berdedikasi di Wellington, sebuah kelompok kecil yang berbasis di *Pacific Development Group* milik kementerian yang mengawasi program bantuan New Zealand dan kebijakan luar negeri yang terkait dengan Pasifik. Mark juga mengemukakan bahwa sejak hadirnya *Pacific Reset*, upaya-upaya diplomasi publik telah menghubungkan kementerian luar negeri dengan komunitas-komunitas yang sebelumnya tidak dapat dijangkau.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Caroline Kirkness pada tahun 2022 dengan judul “*Shifting Tides: New Zealand’s Foreign Policy Shift in the Pacific A small state’s response to changing global challenges*” mengidentifikasi tiga faktor yang menjadi dasar perubahan kebijakan luar negeri New Zealand yaitu respon perubahan iklim sebagai ancaman nyata yang dihadapi Pasifik, lingkungan strategis yang semakin diperebutkan di Pasifik khususnya negara China dan mengamankan lingkungan Pasifik yang stabil dari gangguan yang disebabkan oleh hal-hal diluar negara termasuk aktivitas kriminal transnasional seperti penyelundupan narkoba dan senjata ilegal serta penangkapan ikan ilegal.

Ancaman iklim merupakan ancaman yang nyata dan sudah diidentifikasi sebagai masalah yang paling mendesak bagi negara-negara Pasifik sehingga dimasukkannya perubahan iklim sebagai komponen kunci dari *Pacific Reset* juga menyelaraskan prioritas dan nilai-nilai New Zealand dengan negara-negara Pasifik, hal ini memungkinkan New Zealand untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Pasifik bahkan membangun pengaruh di wilayah tersebut.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Tulisan	Tujuan	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan
<p><i>The Pacific Reset A Retroliberal Analysis</i> oleh Thomas McDowall (2019)</p>	<p>Menganalisis pergeseran rezim bantuan dalam konteks New Zealand.</p>	<p>Retroliberalisme</p>	<p><i>Pacific Reset</i> sejalan dengan beberapa prinsip retroliberalisme tetapi tidak sepenuhnya karena kebijakan ini masih berada pada tahap awal.</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan teori retroliberalisme untuk memahami pergeseran rezim bantuan New Zealand, sedangkan penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana implementasinya dalam konteks krisis perubahan iklim.</p>
<p><i>Identity, national security and influence: The 'Pacific Reset' and shaping New Zealand's relations with the Pacific islands</i> oleh Anna Powles (2021)</p>	<p>Menganalisis sejauh mana <i>Pacific Reset</i> terbentuk dan persaingan geopolitik serta kekhawatiran meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik serta bagaimana posisi New Zealand di Pasifik Selatan.</p>	<p><i>National Interest</i></p>	<p><i>Pacific Reset</i> merupakan sebuah ambisi strategis New Zealand yang memicu peningkatan kemampuan New Zealand untuk mempengaruhi mitra Pasifiknya karena kekhawatiran bahwa pengaruhnya mulai berkurang.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus kepada salah satu faktor pendorong dibuatnya kebijakan <i>Pacific Reset</i> yaitu kekhawatiran New Zealand akibat munculnya Tiongkok di Pasifik Selatan, hal itu mengancam kepentingan nasional New Zealand dalam mempertahankan pengaruhnya di Pasifik Selatan. Sedangkan penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana implementasinya dalam konteks krisis perubahan iklim yang semakin nyata.</p>

<p><i>New Zealand's public diplomacy in the Pacific: a reset, or more of the same?</i> oleh Simon Mark (2022)</p>	<p>Menganalisis sejauh mana <i>public diplomacy</i> kebijakan luar negeri New Zealand <i>Pacific Reset</i> yang menekankan keterlibatan, kemitraan dan kolaborasi.</p>	<p>Diplomasi Publik</p>	<p><i>Pacific Reset</i> berfokus pada <i>soft diplomacy</i>, terlihat dengan banyaknya sumber daya manusia yang bekerja pada diplomasi publik yang berfokus pada Pasifik, kolaborasi yang dilakukan dengan Pasifika TV serta kunjungan yang dilakukan pemimpin politik New Zealand ke negara-negara di Pasifik Selatan.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada diplomasi publik yang dilakukan New Zealand ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan. Sedangkan penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan bagaimana implementasinya dalam konteks krisis perubahan iklim.</p>
<p><i>Shifting Tides: New Zealand's Foreign Policy Shift in the Pacific A small state's response to changing global challenges</i> oleh Caroline Kirkness (2022)</p>	<p>Menganalisis mengapa perombakan kebijakan New Zealand diperlukan, dengan tiga faktor pendukung yang saling berkaitan.</p>	<p><i>National Interest</i></p>	<p>Perubahan kebijakan New Zealand yaitu "<i>Pacific Reset</i>" untuk menghadapi tantangan baru dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan dan potensi dampak perubahan iklim di Pasifik Selatan.</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan teori kepentingan nasional untuk melihat tiga faktor pendukung munculnya <i>Pacific Reset</i> yaitu respon terhadap dampak perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial yang dihadapi Pasifik, munculnya Tiongkok sehingga lingkungan strategis semakin diperebutkan dan mengamankan lingkungan Pasifik dari ancaman non negara. Sedangkan penulis berfokus faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan <i>Pacific Reset</i> dan implementasinya dalam konteks perubahan iklim.</p>